



Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik dan Dinamika Kebijakan Pemerintah di Era Digital

Duvalio Adnan Zordi^{1*}, Mohammad Syahrul Ihsan², Muhamad Aprian Nazarudin³,
Tria Patrianti⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: duvalioadnan@gmail.com¹, ihsansyahrul1110@gmail.com², aprianrian456@gmail.com³,
tria.patrianti@umj.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: duvalioadnan@gmail.com

Abstract The 21st century is marked by a profound transformation in digital communication. Social media has become a new public space, enabling people to interact, disseminate information, and shape public opinion rapidly and massively. This article analyzes the role of social media in shaping public opinion and its influence on the dynamics of government policy in Indonesia. Through a literature review and case analysis of policies influenced by viral issues on social media, this study finds that social media increases citizen participation and accelerates government responses to public issues. However, the pattern of 'viral-based policy' also carries risks, such as reactive policies, a lack of evidence-based policies, and inequality in representation. To manage this phenomenon, the government needs to develop an inclusive digital communication strategy, establish an early detection system for public sentiment, and uphold the principles of good governance and evidence-based policy. These findings are relevant for academics and policymakers seeking to understand the interaction between social media, public opinion, and government policy in the digital era.

Keywords: Agenda-Setting; Digital Governance; Public Opinion; Public Policy; Social Media.

Abstrak. Abad ke-21 ditandai oleh transformasi komunikasi digital yang mendalam. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat berinteraksi, menyebarkan informasi, dan membentuk opini publik secara cepat dan masif. Artikel ini menganalisis peran media sosial dalam pembentukan opini publik dan pengaruhnya terhadap dinamika kebijakan pemerintah di Indonesia. Melalui tinjauan literatur dan analisis kasus kebijakan yang dipengaruhi oleh isu viral di media sosial, penelitian ini menemukan bahwa media sosial meningkatkan partisipasi warga dan mempercepat respons pemerintah terhadap masalah publik. Namun, pola 'viral-based policy' juga membawa risiko, seperti kebijakan yang bersifat reaktif, kurang berbasis bukti, dan ketimpangan representasi. Untuk mengelola fenomena ini, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi digital yang inklusif, membangun sistem deteksi dini sentimen publik, serta menjaga prinsip good governance dan evidence-based policy. Temuan ini relevan bagi akademisi dan pembuat kebijakan yang ingin memahami interaksi antara media sosial, opini publik, dan kebijakan pemerintah di era digital.

Kata Kunci: Agenda-Setting; Kebijakan Publik; Media Sosial; Opini Publik; Tata Kelola Digital.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Salah satu manifestasi paling menonjol dari perubahan tersebut adalah kemunculan media sosial sebagai medium komunikasi publik yang berpengaruh. Platform digital seperti Twitter/X, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube tidak lagi berfungsi sebatas sarana hiburan atau komunikasi interpersonal, melainkan telah berevolusi menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan pertukaran informasi, pembentukan opini publik, serta artikulasi kepentingan masyarakat secara cepat, luas, dan masif (Cinelli et al., 2021).

Di Indonesia, tingginya tingkat penetrasi internet dan penggunaan media sosial semakin memperkuat posisi media sosial sebagai sumber utama informasi publik. DataReportal (2024)

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses berita dan isu kebijakan melalui platform digital. Karakter media sosial yang bersifat interaktif, real-time, dan partisipatif mendorong masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen opini yang aktif. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai arena strategis dalam proses komunikasi politik dan demokrasi, di mana opini masyarakat dapat dengan cepat membentuk persepsi publik dan memengaruhi diskursus kebijakan (Gilardi et al., 2022).

Dalam konteks pemerintahan, kehadiran media sosial telah menggeser dinamika hubungan antara negara dan warga negara. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam menentukan agenda publik, karena opini yang berkembang di ruang digital mampu menekan, mengarahkan, bahkan mengubah proses pengambilan kebijakan. Isu-isu yang menjadi viral sering kali memaksa pemerintah untuk memberikan respons cepat, baik dalam bentuk klarifikasi kebijakan, penyesuaian regulasi, maupun pembatalan kebijakan yang telah direncanakan. Fenomena ini mencerminkan pergeseran pola komunikasi kebijakan dari model satu arah menuju komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan dialogis (Yuan et al., 2023).

Berbagai peristiwa kebijakan di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh opini publik berbasis media sosial. Pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), penundaan pengesahan RUU Pilkada, penangguhan izin impor susu, hingga penundaan implementasi program Tapera merupakan contoh konkret bagaimana tekanan opini publik di media sosial memengaruhi keputusan pemerintah (CNN Indonesia, 2024; Hukumonline, 2024; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi kanal utama artikulasi aspirasi publik sekaligus instrumen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Namun demikian, dominasi media sosial dalam pembentukan opini publik juga menimbulkan tantangan serius bagi kualitas kebijakan publik. Respons pemerintah yang terlalu bergantung pada tekanan opini viral berpotensi melahirkan kebijakan yang bersifat reaktif, jangka pendek, dan kurang berbasis pada kajian akademik serta data empiris. Selain itu, fenomena echo chamber di media sosial dapat memperkuat opini tertentu secara berulang tanpa melalui proses deliberasi yang inklusif dan rasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu merepresentasikan kepentingan publik secara menyeluruh (Cinelli et al., 2021).

Lebih jauh, ketimpangan akses digital dan literasi media menyebabkan tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan aspirasi di ruang digital. Akibatnya, opini yang dominan di media sosial sering kali merepresentasikan kelompok tertentu yang lebih vokal dan terhubung secara digital, bukan kepentingan

masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini berpotensi menciptakan distorsi dalam proses agenda setting kebijakan publik (Gilardi et al., 2022).

Fenomena kebijakan berbasis viralitas (viral-based policy) menjadi isu krusial dalam kajian komunikasi kebijakan dan public affairs. Di satu sisi, media sosial memperkuat partisipasi warga dan memperluas ruang demokrasi; di sisi lain, tanpa pengelolaan yang strategis, media sosial dapat melemahkan prinsip kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (OECD, 2020; United Nations [UN DESA], 2024).

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana media sosial membentuk opini publik, bagaimana opini tersebut memengaruhi dinamika pengambilan kebijakan pemerintah, serta bagaimana peran Public Affairs dalam mengelola komunikasi organisasi secara strategis. Pemahaman ini penting agar pemerintah mampu menyeimbangkan tuntutan responsivitas publik dengan prinsip rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan dalam era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Media Sosial dan Opini Public

Media sosial merupakan instrumen penting dalam pembentukan opini publik. Studi oleh Hariani dan Wardana (2025) menekankan bahwa media sosial memfasilitasi pergeseran pola komunikasi dari top-down menuju bottom-up. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok dan YouTube memungkinkan orang mengekspresikan pendapat, berdiskusi, dan menyebarkan informasi dengan cepat. Melalui mekanisme komentar, likes, dan share, pandangan terhadap suatu kebijakan dapat berkembang menjadi opini kolektif. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi; media sosial memberi legitimasi bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah.

Namun, algoritme media sosial juga berpotensi menciptakan ‘filter bubble’ di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sehingga meningkatkan polarisasi. Konten yang sering diinteraksi cenderung muncul lebih sering di linimasa pengguna lain, memperluas jangkauan dan pengaruhnya. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai alat kontrol sosial di mana publik dapat mengkritik, memberi masukan, atau menolak kebijakan yang tidak disukai. Tekanan opini publik digital bahkan bisa menyebabkan pemerintah merevisi atau membatalkan kebijakan.

Teori Agenda-Setting

Teori agenda-setting menjelaskan bagaimana media memengaruhi isu yang dianggap penting oleh publik dan pembuat kebijakan. Rogers dan Dearing membedakan tiga jenis agenda: agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Media menentukan isu yang mendapatkan sorotan, agenda publik mencerminkan apa yang dianggap penting oleh masyarakat, sedangkan agenda kebijakan mencakup isu yang menjadi perhatian pembuat kebijakan. Teori ini berargumen bahwa media agenda mempengaruhi agenda publik dan akhirnya membentuk agenda kebijakan.

Agenda kebijakan merupakan tahap terakhir di mana isu publik berinteraksi dengan perspektif pembuat kebijakan. Dalam era digital, fragmentasi media dan pola konsumsi individual menimbulkan diversifikasi agenda; orang cenderung mengonsumsi informasi yang sesuai dengan preferensinya. Hal ini menimbulkan agenda individu yang berbeda dari agenda publik kolektif dan membuat interpretasi prioritas publik semakin rumit bagi pembuat kebijakan.

Viral-Based Policy

Konsep viral-based policy merujuk pada kebijakan publik yang dirumuskan sebagai respons cepat terhadap isu yang viral di media sosial. Artikel Antara (2025) menyatakan bahwa fenomena ini mencerminkan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan: partisipasi masyarakat meningkat dan pemerintah terdorong untuk merespons isu viral agar tidak kehilangan legitimasi. Meski memberikan ruang demokratisasi, kebijakan berbasis viralitas sering bersifat reaktif tanpa proses analisis yang memadai; hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara substansi kebijakan dan proses perumusannya. Minimnya deliberasi publik menyebabkan kebijakan kurang representatif dan berisiko menimbulkan polemik baru. Antara merekomendasikan agar pemerintah membangun sistem deteksi dini isu publik berbasis big data, memperkuat proses konsultasi, serta mengembangkan kepemimpinan publik yang adaptif dan visioner.

Aktivisme Digital dan E-Partisipasi

Media sosial juga menjadi medium e-partisipasi, yaitu pelibatan warga secara digital dalam proses perumusan kebijakan. Menurut Economica, Indonesia memiliki sekitar 139 juta pengguna media sosial pada Januari 2024 atau 49,9 % populasi, dan masyarakat menghabiskan rata-rata lebih dari 3 jam di media sosial per hari. E-partisipasi mendorong keterlibatan sipil dan tata kelola yang terbuka melalui teknologi informasi dan komunikasi; proses ini melibatkan warga dalam perancangan kebijakan dan penyampaian layanan publik.

Aktivisme digital muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem dalam mengatasi isu sosial, ekonomi, atau politik. Media sosial menjadi katalisator perubahan yang mampu mengubah wacana publik dan memengaruhi hasil akhir kebijakan. Warga dapat mengekspresikan keresahan, membangun gerakan, dan menekan pemerintah untuk bertindak. Contoh aktivisme digital terlihat dalam kasus ‘Peringatan Darurat’ saat revisi UU Pilkada 2024, ketika kampanye daring memicu unjuk rasa massal hingga DPR membatalkan revisi. Kasus lain adalah pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setelah protes mahasiswa di media sosial, serta aksi buang susu sapi yang menekan pemerintah untuk menangguhkan izin impor perusahaan susu. Aktivisme digital juga muncul dalam kasus Bea Cukai dan alat bantu braille dari Korea Selatan; tekanan publik di media sosial mendorong Menteri Keuangan turun tangan, serta penolakan kebijakan Tapera yang akhirnya ditunda hingga 2027. Fenomena ini membuktikan bahwa media sosial adalah instrumen efektif untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kasus. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi, berita daring kredibel, serta dokumen kebijakan publik yang relevan dengan fenomena pengaruh media sosial terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi berdasarkan teori agenda-setting, opini publik, serta komunikasi kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika interaksi antara media sosial, opini publik, dan respons kebijakan pemerintah di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial saat ini telah menjelma menjadi ruang publik digital yang berperan besar dalam membentuk opini masyarakat. Platform seperti Twitter/X, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan, melainkan juga arena politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapat secara terbuka. Karakter media sosial yang interaktif dan berlangsung secara real-time membuat penyebaran informasi terjadi dengan cepat, sehingga opini publik dapat terbentuk dalam waktu singkat dan memberi tekanan kepada pemerintah untuk segera menanggapi isu yang berkembang.

Opini publik yang lahir di ruang digital memiliki pengaruh nyata terhadap arah kebijakan. Masyarakat kini bukan hanya penerima informasi, tetapi juga produsen opini

melalui unggahan, komentar, dan kampanye daring. Fenomena isu viral memperlihatkan bagaimana persepsi publik dapat berubah secara masif dan mendorong pemerintah untuk melakukan klarifikasi, penyesuaian, bahkan pembatalan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi kebijakan dari yang semula satu arah menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Meski demikian, dominasi media sosial dalam pembentukan opini publik juga menghadirkan tantangan. Kebijakan yang lahir dari tekanan opini viral sering kali bersifat reaktif dan kurang didukung oleh kajian akademik maupun data empiris. Selain itu, opini yang dominan di media sosial belum tentu mewakili kepentingan seluruh masyarakat, karena tidak semua kelompok memiliki akses dan kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi dalam kebijakan publik.

Di sisi lain, media sosial juga berfungsi sebagai katalisator bagi aktivisme digital. Gerakan masyarakat yang muncul di ruang digital mampu mengubah wacana publik dan memengaruhi hasil akhir kebijakan. Kasus penundaan kebijakan Tapera maupun pembatalan kenaikan UKT menjadi contoh bagaimana tekanan publik melalui media sosial dapat mengubah keputusan pemerintah. Aktivisme digital ini memperkuat partisipasi warga sekaligus memperluas ruang demokrasi.

Dalam konteks organisasi dan lembaga, peran Public Affairs menjadi semakin penting. Fungsi ini bertugas mengelola komunikasi strategis, menjaga reputasi, serta menjembatani hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Public Affairs dituntut untuk mampu membaca dinamika opini publik digital, menyediakan analisis berbasis data, dan memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap inklusif serta berbasis bukti. Dengan strategi komunikasi yang tepat, Public Affairs dapat membantu organisasi menghadapi tekanan opini publik sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam demokrasi digital. Kehadirannya mempercepat pembentukan opini publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memengaruhi dinamika kebijakan pemerintah. Namun, ketergantungan berlebihan pada opini viral dapat menurunkan kualitas kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi digital yang responsif namun tetap berbasis data, serta peran aktif Public Affairs dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi publik dan kepentingan organisasi maupun pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan media sosial telah mengubah pola pembentukan opini publik dan cara isu-isu kebijakan memperoleh perhatian. Ruang digital memungkinkan informasi dan narasi tentang kebijakan beredar dalam tempo sangat cepat, sehingga publik tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga aktor yang ikut mengarahkan wacana. Melalui unggahan, komentar, berbagi konten, tagar, hingga mobilisasi dukungan, opini publik dapat terbentuk sebagai persepsi kolektif yang tampak dominan, lalu menjadi tekanan sosial yang mendorong pemerintah untuk merespons. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital yang memperkuat kontrol sosial, memperluas partisipasi warga, dan meningkatkan tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik digital dapat memengaruhi dinamika kebijakan melalui beberapa mekanisme utama, yakni meningkatnya visibilitas isu, terbentuknya sentimen publik yang masif, serta tekanan reputasi terhadap lembaga pemerintah. Pemerintah cenderung merespons isu yang ramai dibicarakan melalui klarifikasi, penyesuaian teknis, penundaan implementasi, atau evaluasi ulang kebijakan. Pola ini memperlihatkan adanya responsivitas yang lebih cepat dibandingkan era komunikasi konvensional, karena pemerintah perlu menjaga legitimasi dan kepercayaan publik di tengah arus informasi yang dinamis. Dengan demikian, media sosial pada satu sisi dapat menjadi kanal partisipasi warga yang memperkuat demokratisasi proses kebijakan. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa respons kebijakan yang terlalu bergantung pada lonjakan viralitas berpotensi mengarah pada “viral-based policy”, yakni kecenderungan kebijakan menjadi reaktif dan lebih menekankan manajemen persepsi dibandingkan perbaikan substansi. Dalam situasi tertentu, tekanan opini digital dapat mendorong pengambilan keputusan yang terburu-buru, memotong proses kajian, serta mengurangi ruang deliberasi yang inklusif. Selain itu, opini dominan di media sosial tidak selalu mencerminkan kepentingan publik secara menyeluruh karena adanya ketimpangan akses, literasi digital, dan keterwakilan kelompok rentan. Oleh sebab itu, respons pemerintah terhadap arus opini digital perlu dikelola secara hati-hati: cepat dalam komunikasi, tetapi tetap cermat dalam keputusan kebijakan agar prosesnya berbasis data, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang.

Saran

Untuk mengoptimalkan manfaat media sosial sekaligus meminimalkan risikonya terhadap kualitas kebijakan, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu membangun mekanisme komunikasi digital yang bukan sekadar responsif, tetapi juga terarah dan konsisten. Respons cepat terhadap isu viral sebaiknya diposisikan

sebagai langkah awal untuk meredakan ketidakpastian informasi, bukan sebagai dasar tunggal pengambilan keputusan. Pemerintah dapat memperkuat standar komunikasi krisis dan komunikasi kebijakan yang menekankan kejelasan pesan, keterbukaan data, serta penjelasan alasan kebijakan secara mudah dipahami publik. Dengan begitu, komunikasi pemerintah tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi juga meningkatkan literasi kebijakan dan mendorong diskusi publik yang lebih sehat. Kedua, diperlukan sistem deteksi dini sentimen publik yang mendukung analisis kebijakan, bukan sekadar mengukur popularitas isu. Pemerintah dapat mengembangkan pemantauan isu secara etis dan transparan untuk memetakan pola percakapan publik, jenis keluhan yang berulang, kelompok terdampak, serta potensi risiko kebijakan. Hasil pemantauan tersebut sebaiknya diterjemahkan menjadi masukan teknokratik, misalnya daftar masalah utama, opsi penanganan, dan estimasi dampak, sehingga keputusan tetap berbasis data dan mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kanal partisipasi publik yang lebih inklusif dan terstruktur agar aspirasi masyarakat tidak hanya ditangkap dari kelompok yang paling vokal di media sosial. Konsultasi publik, uji publik regulasi, forum dialog, layanan pengaduan yang mudah diakses, serta mekanisme feedback yang jelas dapat menjadi penyeimbang ruang percakapan digital. Dalam praktiknya, pemerintah dapat mengombinasikan partisipasi daring dan luring untuk menjangkau kelompok yang akses digitalnya terbatas, sehingga representasi aspirasi publik menjadi lebih adil. Keempat, unit Public Affairs dan komunikasi kelembagaan perlu diarahkan untuk mengelola isu berbasis substansi kebijakan, bukan hanya menjaga citra. Public Affairs sebaiknya berperan sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan proses kebijakan internal, termasuk menyusun narasi kebijakan yang akurat, mengantisipasi miskonsepsi, serta mengoordinasikan respons lintas instansi agar pesan dan tindakan pemerintah selaras. Pada saat yang sama, koordinasi internal juga penting agar kebijakan yang direspons cepat tetap memiliki dasar analisis yang memadai dan tidak menimbulkan kontradiksi antar lembaga. Kelima, peningkatan literasi digital masyarakat tetap menjadi kebutuhan penting. Penyebaran informasi yang cepat di media sosial memudahkan terbentuknya opini, tetapi juga meningkatkan risiko misinformasi, disinformasi, dan penguatan narasi yang bias. Karena itu, kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, media, dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk memperkuat literasi informasi, etika berdiskusi, serta kemampuan verifikasi sumber, sehingga opini publik yang terbentuk lebih rasional dan berorientasi pada pemecahan masalah. Terakhir, untuk penelitian lanjutan, disarankan agar kajian tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga menguji hubungan sebab-akibat secara lebih terukur. Penelitian berikutnya dapat memperluas jumlah kasus, membandingkan respons kebijakan antar sektor, memetakan aktor-

aktor penguat isu, serta menggabungkan analisis kualitatif dengan data percakapan digital. Dengan penguatan metodologi tersebut, pemahaman tentang dampak media sosial terhadap kebijakan akan lebih komprehensif, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tata kelola digital yang lebih presisi.

DAFTAR REFERENSI

- Channel News Asia (CNA Indonesia). (2024, 10 Juni). Tapera tidak dibatalkan, pemberlakuan ditunda ke paling lambat 2027. *CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia*.
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. We Are Social UK.
- CNN Indonesia. (2024, 11 November). Izin impor ditangguhkan usai peternak buang susu. *CNN Indonesia*.
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Indonesia* (report). DataReportal – Global Digital Insights.
- Gilardi, F., Shipan, C. R., & Wüest, B. (2022). Social media and political agenda setting. *Political Communication*. PNAS.
- Hukumonline. (2024, 22 Agustus). DPR RI tunda pengesahan RUU Pilkada. *Hukum Online* (berita/analisis).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024, 28 Mei). Siaran pers tindak lanjut pembatalan kenaikan UKT dan IPI TA 2024/2025. *Balai Guru NTT*.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024, 23 Agustus). KPU akan konsultasi ke DPR dan pemerintah terkait putusan MK. *Komisi Pemilihan Umum* (keterangan/berita).
- Medcom.id. (2024, 30 April). Soal barang hibah SLB tertahan 2 tahun. *Medcom.id* (berita).
- OECD. (2020). *Building capacity for evidence-informed policymaking in governance and public administration* (report). Vlāda Ceko.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, 27 Mei). Presiden Jokowi: Kenaikan UKT dibatalkan untuk tahun ini. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* (rilis/berita).
- Tempo. (2024, 29 April). Bea Cukai serahkan keyboard braille hibah. *Tempo* (berita).
- United Nations (UN DESA). (2024). *United Nations E-Government Survey 2024: Digital Government Model Framework for Sustainable Development* (report). ResearchGate.
- Wang, Y., Zhang, J., & Zeng, R. (2021). When public relations meets social media: A systematic review of social media-related public relations research. *Public Relations Review*.
- Yuan, Y.-P., Dwivedi, Y. K., Tan, G. W.-H., Cham, T.-H., Ooi, K.-B., Aw, E. C.-X., & Currie, W. (2023). Government digital transformation: Understanding the role of government social media. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101775. Jag Scholastica.